

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganggaran berbasis kinerja mulai diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 lalu sebagai bentuk amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Artinya penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan hasil dari reformasi keuangan negara sebagai upaya tata kelola anggaran yang lebih baik, akuntabel, dan transparan. penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting adalah sistem penganggaran yang berfokus terhadap output yang terhubung dengan visi dan misi serta perencanaan dari suatu strategi organisasi (Bastian, 2006). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional disebutkan bahwa penganggaran berbasis kinerja menggunakan konsep penganggaran berbasis program (*money follow program*).

Dalam penganggaran berbasis kinerja terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni anggaran. Hal ini karena, anggaran merupakan salah satu

instrumen yang berpengaruh terhadap suatu satuan kerja (satker) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada penganggaran berbasis kinerja, penyusunan anggaran haruslah memperhatikan hubungan antara input dan output yang ingin dicapai (Mulyono & Heryanti, 2019). Karenanya pencapaian target kinerja dari suatu organisasi atas penggunaan anggaran menjadi fokus dalam penganggaran berbasis kinerja (Biswan & Grafitanti, 2021). Tentunya pencapaian kinerja ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran yang digunakan suatu satker dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Negara (RKA K/L) terdapat tiga (3) pendekatan yang harus digunakan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan RKA K/L menggunakan instrumen yang meliputi indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang ditulis oleh penulis, nantinya terkait dengan Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan dilakukan perbandingan pada tiap tahun, dari 2019 hingga 2021 sebagai hasil penerapan penganggaran berbasis kinerja. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang dibuat oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga ditinjau dari segi aspek kesesuaian dalam perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. (DJPB,2021).

Penilaian atas IKPA selalu dinamis dan berubah menyesuaikan setiap kondisi/keadaan. Dalam Tahun Anggaran (TA) 2021 terdapat perubahan penilaian

IKPA melalui terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (DJPB,2021). Peraturan ini mencabut PER-4/PB/2020 yang sebelumnya telah berjalan. Dalam praktiknya, IKPA berperan menjadi alat monitoring dan evaluasi dalam mengukur hasil kinerja satker terhadap empat (4) aspek sesuai dengan definisinya. Penilaian IKPA diterapkan pada sistem aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dilakukan oleh Direktorat Perbendaharaan Negara (DJP).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai analisis IKPA sebagai hasil dari evaluasi anggaran atas pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Dalam mendukung upaya tersebut, penulis berencana melakukan penelitian atas Analisis IKPA tahun 2019 – 2021 pada objek Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat capaian nilai IKPA Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 – 2021 dan membandingkannya serta menelaah lebih lanjut dampak dari perubahan komponen IKPA dari tahun 2019 hingga 2021 terhadap pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada objek bersangkutan. Hasil analisis yang penulis lakukan nantinya akan dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Analisis IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan 2019 – 2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana hasil dari implementasi IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 – 2021?
2. Bagaimana hasil perbandingan penilaian IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 – 2021?
3. Apa saja permasalahan dan kendala dalam implementasi IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Mengetahui hasil dari implementasi IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 – 2021.
2. Mengetahui hasil perbandingan IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 – 2021.
3. Mengetahui permasalahan dan kendala dalam implementasi IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 – 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini akan berfokus pada Analisis penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada di

bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Adapun yang menjadi alasan pemilihan Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan menjadi objek dari penulisan KTTA ini ialah lokasinya yang terletak berdekatan dengan domisili penulisan. Hal ini juga untuk memudahkan proses penelitian dan pengambilan data dalam proses penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) penulis. Selain itu, alasan penulis memilih tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 adalah untuk melakukan analisis perbandingan penilaian IKPA pada Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan atas terjadinya perubahan/reformulasi komponen IKPA.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

1. Menambah informasi dan wawasan untuk penulis, khususnya terkait implementasi IKPA sebagai pelaksanaan dari penganggaran berbasis kinerja dengan membandingkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan praktik nyatanya di lapangan
2. Meningkatkan kemampuan penulis dalam mengolah data, menyusun gagasan pikiran, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.
3. Menjadi bentuk pengabdian dan warisan penulis sebagai mahasiswa tingkat akhir DIII Kebendaharaan Negara PKN STAN.

b. Bagi Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan

1. Menjadi referensi pengambilan kebijakan dan evaluasi untuk Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan dalam penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai bentuk pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja
 2. Menjadi sarana bagi Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan penganggaran berbasis kinerja, khususnya terkait implementasi IKPA.
- c. Bagi Pembaca
1. Menambah wawasan pembaca terkait penerapan IKPA dalam penganggaran berbasis kinerja.
 2. Menjadi referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja, khususnya dalam ruang lingkup penilaian IKPA.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum karya tulis tugas akhir yang terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai konsep dan teori yang dapat menjadi dasar hukum dan pedoman terkait dengan pembahasan KTTA, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Bab ini terdiri atas RKA K/L, Konsep Dasar Penganggaran Berbasis Kinerja, Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Anggaran, dan Konsep Dasar Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan KTTA. Bab ini juga menjelaskan mengenai gambaran umum Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek penelitian yang meliputi profil Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Selain itu dalam bab ini juga terdapat pembahasan mengenai data terkait capaian nilai IKPA Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 2019 – 2021 dan hasil analisisnya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini diuraikan simpulan oleh penulis guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan pada hasil olah data dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.